



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KELEMAHAN SISTEMIK GRC INDONESIA DAN URGENSI PENGUATAN EKOSISTEM MENUJU 2045

Yiyis Aldi Mebra

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yiyis.mebra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Risk and Governance Summit (RGS) 2025 dengan tema "*Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience*" pada 19 Agustus 2025 di Jakarta. *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) merupakan kerangka kerja terintegrasi yang menggabungkan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi untuk memastikan operasional yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan dinamika global, implementasi GRC yang *robust* menjadi prasyarat fundamental untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju realisasi visi Indonesia Emas 2045. Kerangka GRC tidak lagi dipandang sebagai instrumen kepatuhan semata, melainkan sebagai kompas strategis yang mengarahkan organisasi dalam menavigasi ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar global.

Evaluasi komprehensif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi kelemahan sistemik yang signifikan dalam implementasi GRC di Indonesia. Permasalahan struktural yang dihadapi meliputi: perencanaan dan penganggaran yang belum berbasis kinerja secara konsisten, lemahnya sistem pengendalian internal di berbagai lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset negara, dan koordinasi lintas entitas yang belum mencapai tingkat sinergi optimal. Kelemahan ini diperburuk oleh: minimnya partisipasi sektor swasta dalam tata kelola publik, regulasi yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas di BUMN, serta implementasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang belum efektif. Kondisi sistemik ini secara langsung menghambat pencapaian target pembangunan nasional, melemahkan kepercayaan investor, dan mengurangi daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional maupun global.

Era digitalisasi dan transformasi teknologi finansial menghadirkan tantangan baru yang memperumit implementasi GRC tradisional. Ancaman kejahatan siber, *fraud* lintas batas negara yang memanfaatkan celah regulasi, dan praktik *regulatory arbitrage* yang mengeksploitasi perbedaan pengaturan antar yurisdiksi memerlukan pendekatan GRC yang lebih *sofisticated*, terintegrasi, dan responsif. Ketua Dewan Komisiner OJK, Mahendra Siregar, menekankan bahwa sektor jasa keuangan, sebagai tulang punggung perekonomian nasional, menghadapi tantangan strategis untuk mentransformasi GRC. GRC bukan lagi sekadar instrumen kepatuhan regulasi, tetapi menjadi kompas strategis dalam menavigasi ketidakpastian ekonomi dan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Merespons kompleksitas permasalahan tersebut, penguatan ekosistem GRC menjadi agenda strategis nasional yang mendesak. Upaya penguatan ini diinisiasi melalui pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan sinergi internal antar satuan kerja dengan kemitraan lintas sektor dan partisipasi aktif di tingkat regional serta global. OJK sebagai regulator utama sektor jasa keuangan berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga negara, lembaga

jasa keuangan, dan asosiasi profesi GRC. Hal ini dilakukan untuk membangun ekosistem yang saling menopang, berlandaskan profesionalisme tinggi, dan berorientasi pada integritas yang tidak tergoyahkan.

Strategi penguatan ekosistem GRC diwujudkan melalui harmonisasi regulasi antar lembaga, integrasi kebijakan lintas sektor yang sinergis, dan pemanfaatan teknologi berbasis data *real-time* serta *artificial intelligence*. BPK, dalam rencana strategis 2025—2029, menetapkan kebijakan pemeriksaan strategis yang bersifat antisipatif dan responsif. BPK secara eksplisit menempatkan GRC sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendekatan ini mengadopsi tren global yang mengarah pada integrasi dan otomatisasi GRC melalui sistem terpadu dan canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemampuan pengelolaan risiko yang prediktif.

Implementasi penguatan ekosistem GRC memerlukan transformasi paradigma fundamental dari pendekatan sektoral konvensional menuju tata kelola kolaboratif yang adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Anggota Dewan Komisiner OJK, Sophia Wattimena, menggarisbawahi bahwa penguatan ini merupakan pilar fundamental dalam mendukung implementasi Asta Cita, khususnya dalam misi penguatan sektor jasa keuangan dan reformasi tata kelola untuk pemberantasan korupsi secara sistemik. Keberhasilan penguatan ekosistem GRC akan menentukan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan visi ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan menuju kejayaan Indonesia Emas 2045.

Atensi DPR

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, turut hadir dalam RGS 2025, menandakan komitmen legislatif dalam mendukung penguatan ekosistem GRC nasional. Keterlibatan DPR RI menjadi krusial dalam harmonisasi regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar keuangan global. Fungsi legislasi DPR RI diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung implementasi GRC yang adaptif dan kolaboratif, termasuk regulasi yang memfasilitasi partisipasi sektor swasta dalam tata kelola publik. DPR RI juga memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi rekomendasi BPK terkait perbaikan sistem GRC di lembaga negara dan BUMN. Dukungan legislatif diperlukan untuk mempercepat transformasi digital sistem GRC dan memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk penguatan infrastruktur tata kelola yang mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Sumber

bpk.go.id, 19 Agustus 2025;
cnnindonesia.com, 19 Agustus 2025; dan
pasardana.id, 19 Agustus 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa